

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS BELANJA BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DI KABUPATEN BOALEMO

Oleh: Usman

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Laporan arus kas belanja yang disajikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo meliputi Laporan Aktivitas Operasi, aktivitas Investasi dan aktivitas pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Laporan Arus Kas Belanja berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dituangkan dalam PP no.71 tahun 2010 dengan penyajian laporan arus kas belanja yang diterapkan di Kabupaten Boalemo dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif yang menggambarkan dan membandingkan antara penyajian laporan arus kas belanja di Kabupaten Boalemo dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan obyek dalam penelitian ini adalah laporan arus kas belanja berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sedangkan lokasi penelitian tepatnya di BPKAD Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

Kata Kunci : Analisis, Arus Kas, SAP.

PENDAHULUAN

Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Standar akuntansi yang digunakan dalam pencatatan arus kas pada pemerintah daerah adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP Nomor 71 tahun 2010), yang menggunakan basis modifikasian kas menuju akrual (*cash towards accrual*). Basis ini mengharuskan penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dengan basis akrual sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas. Aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan unsur neraca sedangkan pendapatan, belanja dan pembiayaan merupakan unsur laporan realisasi anggaran. Neraca disajikan dengan basis akrual dan laporan realisasi anggaran serta laporan arus kas belanja disajikan dengan basis kas. Namun demikian konsep tersebut tidak sepenuhnya di aplikasikan pada pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia termasuk di Kabupaten Boalemo.

Akuntansi Pemerintahan

Lembaga pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan jasa akuntansi, baik analisis maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan, pendidikan dan pengelolaan keuangan untuk menghasilkan informasi yang akan di gunakan. Akuntansi demikian dikenal dengan akuntansi pemerintahan, untuk dapat memahami pengertian yang lebih jelas mengenai akuntansi pemerintahan, di sini penulis mengemukakan pengertian akuntansi pemerintahan menurut Baswir (2000:7) adalah akuntansi pemerintahan (termasuk di dalamnya akuntansi untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya)